STRATEGI PARTAI POLITIK DALAM MENGHADAPI PEMILU 2014

Debora Sanur Lindawati*

Abstract

Political party is a means for political participation of the constitutional democracy to realize the national ideals of the Indonesian. Meanwhile, the election is an arena for people to express their freedom in choosing and selecting their leaders. In this context, political party as a political machine must be able to understand public aspiration, especially regarding legislatives and presidential candidates and their running mate the 2014 election. Otherwise, political parties will be more ignored by public. This condition will increase the member of people who will not exercise their political right in the coming election.

Keywords: *2014 election, political party, democracy, political marketing, party strategy*

Abstrak

Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Sementara itu, Pemilu adalah arena untuk mengekspresikan kebebasan rakyat dalam memilih dan menseleksi pemimpinnya. Namun demikian Partai politik sebagai mesin politik yang sangat efektif, harus dapat memahami selera publik terutama terkait penentuan calon legislatif, calon presiden dan calon wakil presiden dalam strateginya untuk menghadapi Pemilu 2014. Jika tidak, partai politik akan ditinggalkan publik.

Kata Kunci: Pemilu 2014, partai politik, demokrasi, marketing politik, strategi partai

* Penulis adalah Peneliti Muda Bidang Ilmu Politik di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI email: debora_sanur@yahoo.com

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Di negara yang sudah maju terutama negara Barat, persaingan untuk memperoleh suara dalam pemilihan umum dianggap sebagai alternatif yang baik untuk menentukan figur seorang pemimpin politik yang mempunyai tanggung jawab terhadap pemilihnya. Dalam hal ini partai politik dan seorang calon legislatif maupun calon presidennya tidak dapat dipisahkan. Hal ini berbeda dengan kondisi yang terjadi di Indonesia dimana rakyat justru apatis terhadap partai dan para calonnya. Keapatisan masyarakat Indonesia terjadi karena baik partai maupun caleg dan capresnya dinilai tidak sungguh-sungguh bekerja untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakatnya. Yang sangat disayangkan adalah apabila turunnya tingkat kepercayaan masyarakat melihat kondisi politik yang ada, hingga terjadi krisis kepercayaan yang tinggi membuat apatisisme masyarakat semakin terimplementasi dengan tidak ikut memilih pada pemilu atau memilih golput.¹ Padahal golput sangat tidak menguntungkan bagi perjalanan demokrasi bangsa ini. Menurut Direktur Program Prisma-LP3ES Suhardi Suryadi, penilaian masyarakat yang menyamaratakan perilaku semua politisi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai mengakibatkan politisi bersih dan bertanggungjawab terhadap konstituennya bahkan turut menjadi korban.²

Dinamika perkembangan masyarakat yang majemuk memang telah menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia dalam menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, partai sebagai bagian dari pergerakan demokrasi seharusnya dapat memberikan andil yang sangat besar bagi kemajuan bangsa. Dan, diperlukan kesadaran dari partai untuk membangun kesadaran politik yang kolektif di masyarakat. Terutama hal yang perlu mendapat perhatian partai politik dalam menghadapi pemilu seperti bagaimana agar partai-partai memiliki mekanisme demokratis secara internal yang memungkinkan kader terbaik yang jadi capres. Partai juga seharusnya dapat terus menciptakan basis massa yang terorganisir ke bawah sebagai pendukung program-program partai sebagai implementasi ideologinya.

¹ Krisis Kepercayaan Menuju 2014, <http://www.dakwatuna.com/2013/03/27/30012/krisis-kepercayaan-menuju-2014/#axzz2g4SH8GkL>, diakses pada tanggal 26 September 2013.

² <http://news.okezone.com/read/2012/12/30/339/739170/redirect>, diakses pada tanggal 26 September 2013.

Ideologi partai seharusnya dapat menjadi daya tarik masyarakat dalam memberikan suara di pemilihan umum bila ideologi partai tersebut berhasil dinilai sebagai sarana untuk mengagregasi kepentingan umum. Seperti pendapat Ricky Akira bahwa ideologi partai seharusnya dapat menjadi penjelasan bagi agenda politik demi kemajuan demokrasi dan kemajuan kesejahteraan rakyat.³ Karena ideologi partai yang dapat menjadikan partai tersebut menjadi kuat dan akan mampu menjawab tantangan jaman yang terus berubah.

Melalui pemilu, partai politik seharusnya memang dapat menawarkan alternatif kebijakan dan calon pemimpin yang tepat guna mengelola potensi konflik, serta untuk menjaga agar saluran komunikasi tetap terbuka sehingga masyarakat senantiasa dapat terhubung dengan proses politik secara sehat. Dalam hal ini partai sebagai bagian dari pergerakan demokrasi harus dapat memberikan andil yang sangat besar bagi kemajuan bangsa dan kepentingan rakyat.

B. Rumusan Masalah

Pada prinsipnya Pemilu adalah arena untuk mengekspresikan kebebasan rakyat dalam memilih dan menseleksi pemimpinnya. Sedangkan, Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Sejak memasuki masa reformasi tahun 1999, Indonesia dinilai telah mampu berdemokrasi terutama dengan suksesnya pelaksanaan Pemilu untuk memasuki era baru dalam perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu, pemilu setelah tahun 1999 selalu diharapkan dapat berjalan dengan lebih baik lagi, serta dapat menghasilkan pemimpin nasional yang amanah dalam melaksanakan aspirasi rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, kondisi yang terjadi saat ini, dimana Indonesia sedang mempersiapkan pemilu 2014 kepercayaan publik terhadap partai politik justru menurun. Oleh sebab itu kendati tidak mudah, partai politik sebenarnya masih memiliki waktu untuk menyiapkan calon legislator dan capres-cawapres bila partai dapat memperbaiki citra dan kinerja partai.

Oleh sebab itu rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana sistem dan aturan main dalam pemilu 2014?
2. Bagaimana strategi parpol dalam menghadapi pemilu 2014?

³ Ricky Akira, *Ideologi Partai Politik di Indonesia*, http://www.prp-indonesia.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=95, diakses 7 Maret 2008.

II. Kerangka Teori

A. Teori Sistem Pemilu

Menurut Dieter Nohlen, fungsi pemilihan umum meliputi :⁴

- Legitimasi (pengabsahan) sistem politik dan pemerintahan satu partai atau partai koalisi;
- Pelimpahan kepercayaan kepada seseorang atau partai;
- Rekrutasi elit politik;
- Representasi pendapat dan kepentingan para pemilih;
- Mobilisasi massa pemilih demi nilai-nilai masyarakat, tujuan-tujuan dan program-program politik, kepentingan partai politik peserta Pemilu;
- Pengontrolan kesadaran politik masyarakat lewat penggambaran yang jelas masalah-masalah politik yang dihadapi dan alternatif penanggulangan;
- Pengarahan konflik politik secara konstitusi ke arah penyelesaian secara damai;
- Integrasi pluralisme masyarakat;
- Pembentukan satu kekuatan politik bersama yang mampu beraksi;
- Mengundang satu persaingan untuk perebutan kekuasaan berdasarkan penawaran program-program tandingan;
- Memancing keputusan untuk menetapkan pembentukan satu Pemerintah, misalnya lewat pembentukan kekuatan mayoritas dalam parlemen;
- Menciptakan kekuatan oposisi yang mampu melakukan pengawasan;
- Membangun kesiagaan untuk perubahan kekuasaan.

Sedangkan menurut Wichard Woyke, Pemilu terutama berfungsi sebagai:⁵

- Legitimasi (Pemerintah dan parlemen);
- Pengawasan (pemerintah oleh parlemen, dimana kubu oposisi juga bercokol);
- Persaingan (antara Pemerintah dengan oposisi);
- Perwakilan/ integrasi (integrasi para pemilih dengan para wakil rakyat yang dicoblosnya)
- Sistem pemilu mempengaruhi antara lain: ⁶
- susunan lembaga-lembaga yang dipilih
- sistem kepartaian
- pembentukan pendapat dan kehendak masyarakat pemilih

⁴ Pipit R. Kartawidjaja dan Mulyana W. Kusumah, (ed: A. Josias Simon R. dan Aldrin Situmeang). *Sistem Pemilu dan Pemilihan Presiden: Suatu Studi Banding*, Jakarta, Penerbit: KIPP Eropa, Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS) dan *Indonesian Society for Democracy and People Employment (INSIDE)*, Mei 2002, h. 2-3

⁵ *Ibid.*, h. 4

⁶ *Ibid.*, h. 31

- kedudukan kubu-kubu kepentingan dan
- budaya politik.

B. Teori Perwakilan dan Teori Elite sebagai Wakil Rakyat

Partisipasi masyarakat dalam perwakilan politik berawal dari ide atau konsepsi demokrasi sebagai gambaran tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengekangan terhadap hak seseorang, pemanfaatan orang lain untuk mendatangkan keuntungan secara sepihak, dan perlakuan yang berbeda terhadap orang yang berbeda, menggugah orang-orang yang berpikiran idealis untuk merumuskan pola hubungan manusia yang manusiawi secara ideal. Dari pemikiran tersebut, mereka sampai pada satu kesimpulan bahwa ada tiga nilai ideal yang membangun demokrasi sebagai suatu gagasan kehidupan, yaitu kemerdekaan (*freedom*), persamaan (*equality*), dan keadilan (*justice*).⁷

Ada dua teori klasik yang sangat terkenal yang menjelaskan hakekat hubungan wakil dengan terwakil, yaitu teori mandat dan teori kebebasan.⁸ Dalam teori mandat, wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakil dalam proses kehidupan politik. Oleh karena itu, wakil hendaknya selalu berpandangan, bersikap dan bertindak sejalan dengan mandat yang diberikan terwakil dalam melaksanakan tugasnya. Pemberian pandangan wakil secara pribadi dalam proses politik tidak diperkenankan dalam kapasitasnya sebagai wakil. Perbedaan pandangan antara wakil dengan terwakil dapat mengakibatkan menurunnya reputasi dan legitimasi si wakil. Sebaliknya, wakil yang sangat terikat akan mengalami kelambanan dalam berkreasi dalam gerak politiknya.

Dalam teori kebebasan, wakil dianggap perlu merumuskan sikap dan pandangannya tentang masalah yang dihadapi tanpa terikat secara ketat kepada terwakil. Teori ini beranggapan bahwa si wakil telah mendapat kepercayaan penuh dari terwakil. Oleh sebab itu, pertimbangan wakil secara pribadi yang memperhatikan seluruh aspek yang terkait dengan masalah yang dihadapi amat menentukan keputusan dan sikap wakil. Logika teori kebebasan, wakil lebih terfokus terhadap operasionalisasi tugas wakil itu sendiri. Adanya kemungkinan bahwa terwakil tidak merasa terwakili dalam beberapa atau sejumlah masalah karena ketidaksefahamannya dengan wakil tidak dapat dihindarkan dalam teori ini. Hal ini tidak berarti bahwa hak terwakil untuk mengontrol tindakan wakilnya tidak berfungsi. Kontrol yang dilakukan terwakil terhadap wakil tidak berlangsung secara terus menerus.

⁷ Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985, h. 29.

⁸ Austin Ranney, *The Governing of Man*, New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1996, h. 268-271.

Terwakil dapat menghukum wakilnya dengan menarik dukungannya dari si wakil pada pemilihan umum berikutnya. Dalam teori kebebasan, seorang wakil hendaknya memiliki kemampuan yang lebih baik di dalam menganalisa dan memahami permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat ketimbang masyarakat itu sendiri. Jadi, seorang wakil dapat mengedepankan apa yang menurutnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam pembuatan keputusan-keputusan maupun kebijakan-kebijakan.

Sehubungan dengan adanya pengakuan kebebasan wakil dalam melaksanakan tugasnya, maka wakil seperti ini disebut juga sebagai wakil yang bertipe wali (*Trustee*). Wakil yang didasarkan pada teori mandat disebut dengan wakil yang bertipe utusan (*Delegate*).⁹

C. Teori Partai Politik

Ichlasul Amal mengatakan bahwa keberadaan partai politik merupakan sebuah keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis.¹⁰ Sebagai organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (*legitimate*) dan damai. Karena itu partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.

Sigmund Neumann mendefinisikan partai politik sebagai “organisasi artikulatif yang terdiri atas pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa lain kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.”¹¹ Dalam definisi seperti itu, Neumann mengatakan istilah partai politik selalu mengandaikan adanya sistem politik yang demokratis, sebaliknya bila istilah partai politik diterapkan dalam negara otoriter, istilah tersebut merupakan istilah yang kontradiksi.¹²

⁹ Heinz Eulau, *Micro-Macro Political Analysis: Accents on Inquiry*, Chicago, Illinois: Aldine Publishing Comp, 1969, h. 204-215.

¹⁰ Ichlasul Amal, *Teori-teori Mutaahir Partai Politik*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2007, h. i-x

¹¹ Sigmund Neumann, *Op.cit.* h.70

¹² *Ibid.*, h.71.

Ada pun, dalam kerangka komunikasi dari atas ke bawah, fungsi partai politik menjalankan fungsi perantara (*broker*) ide-ide. Dalam fungsi ini, partai politik turut mendiskusikan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan pemerintah. Dalam kerangka komunikasi dari atas ke bawah, partai juga menjalankan fungsi sebagai sarana sosialisasi politik. Dengan fungsi ini, partai politik menanamkan nilai-nilai ideologis dan loyalitas kepada negara dan partai. Fungsi sosialisasi politik bila dijalankan dengan benar akan membawa peningkatan pada identitas nasional dan pemupukan integrasi nasional.

Sedangkan fungsi pengatur konflik, Miriam Budiardjo mengatakan partai politik bisa meredam efek negatif dari pertikaian-pertikaian yang timbul akibat perbedaan etnis, status sosial ekonomi atau agama.¹³

David Easton dalam teori sistemnya mengatakan bahwa partai politik adalah salah satu regulator tuntutan.¹⁴ Easton mengatakan bahwa *input* yang masuk ke dalam sistem akan menghasilkan *output* yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik regulator tuntutan ini. Dalam kaitannya dengan fungsi partai, karakteristik partai amat menentukan *input* yang akan diproses dalam sistem politik. Dengan kata lain karakteristik partai sangat menentukan *output* dari pengolahan sistem tersebut.

Modernisasi mengakibatkan diferensiasi dalam masyarakat atas dasar pekerjaan, pendidikan, status, agama, etnik dan sebagainya yang pada gilirannya dapat mendorong konflik atau sebaliknya kerja sama di antara anggota masyarakat. Dalam konteks ini faktor hubungan elit-massa merupakan faktor yang sangat penting bagi berfungsinya keseluruhan sistem politik. Dan partai politiklah yang selayaknya mempunyai kemampuan baik secara horizontal, yaitu menyatukan berbagai kelompok primordial dan fungsional karena partai dapat terorganisasi secara *cross-sectoral* di instansi-instansi, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, universitas-universitas dan lingkungan rukun warga dan seterusnya, maupun secara vertical, dalam arti memainkan peran sebagai penghubung antar elit dan massa. Peran sebagai penghubung ini oleh Kay Walson disebut *linkage*.

Menurut Ramlan Surbakti definisi partai politik menurut para ilmuwan politik diantaranya menurut Friedrich partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan tersebut akan memberikan kegunaan materil dan idil kepada para anggotanya. Sedangkan menurut Soltau definisi partai

¹³ Sigmund Neumann, *Op.cit.* 19.

¹⁴ David Easton, *A Framework for Political Analysis*, Toronto: The Prentice Hall of Canada, h.122-123.

politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.

Sedangkan ciri-ciri partai politik adalah:

1. Berakar dalam masyarakat lokal;
2. Melakukan kegiatan terus menerus;
3. Berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan; dan
4. Ikut serta dalam pemilihan umum.

D. Strategi Kampanye Politik

Menurut Nursal (dalam Firmanzah, 2007) dalam political marketing, terdapat tiga strategi kampanye politik yaitu: pemasaran produk politik secara langsung kepada calon pemilih (*push political marketing*), pemasaran produk politik melalui media massa (*pull political marketing*), dan melalui kelompok, tokoh atau organisasi yang berpengaruh (*pass political marketing*).¹⁵

Push political: strategi ini lebih berfokus pada isu-isu yang penting bagi para electorate dan bukan hanya menjual kandidat atau partai sebagai komoditas. Pesan komunikasi dari strategi ini bisa disampaikan secara langsung oleh kandidat atau partai namun juga bisa melalui relawan yang datang membagikan brosur, flyer, sticker, dsb. Relawan ini juga yang bertugas untuk mengumpulkan data yang berupa persepsi electorate, mengukur pengaruh pesan dan mencatat perubahan dalam sikap dan perilaku electorate. Strategi ini cukup mudah dilakukan untuk pemilihan lokal.

Pull political: paling banyak dilakukan oleh partai atau kandidat. Strategi ini menyampaikan pesan melalui media massa baik elektronik, cetak, luar ruang, mobile, maupun internet. Strategi ini dapat menyampaikan pesan kepada khalayak banyak namun kurang dapat terukur efektivitasnya. Selain itu strategi ini membutuhkan banyak biaya sehingga hanya memungkinkan dilakukan oleh partai maupun kandidat yang punya banyak dana.

Sedangkan *Pass political*: pada strategi ini pesan disampaikan melalui individu, kelompok maupun organisasi yang mempunyai pengaruh. Cara-cara pendekatan dan lobbying pada strategi ini perlu disesuaikan dengan tipe 2 individu, kelompok dan organisasinya.¹⁶

¹⁵ Firmanzah, Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007.

¹⁶ Dalam Tesis Inco Hary Perdana, Political Marketing Partai Politik Baru Menuju Pemilu 2014 Studi Kasus: Strategi Pemenangan Partai Nasdem, FISIP UI Pasca Sarjana Manajemen Komunikasi Politik. h. 45-46.

III. Pembahasan

A. Sistem Pemilu Dan Aturan Main Pemilu 2014

Dalam persiapan menghadapi pemilu, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi oleh sistem pemilu dan perlu disadari oleh berbagai pihak terutama oleh partai politik itu sendiri:¹⁷ Hal yang perlu dipenuhi tersebut diantaranya adalah bahwa pemilu harus dapat memenuhi aspek keterwakilan (*Representativeness*) dalam tiga artian, yaitu:

1. keterwakilan bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok minoritas, dalam lembaga-lembaga perwakilan.
2. Keterwakilan dalam Keadilan (*Fairness*) yang berarti, bahwa representasi merupakan pendekatan cerminan kekuatan kepentingan dan politik masyarakat dalam lembaga-lembaga perwakilan.
3. Keterwakilan dimana rakyat dapat mempengaruhi proses penentuan calon terjalannya hubungan antara pemilih dengan anggota lembaga perwakilan rakyat.

Oleh sebab itu, pemilu diharapkan dapat menjadi wadah pengumpulan beragam kepentingan masyarakat dan pandangan politik guna memperoleh keputusan dan mempersembahkan kemampuan bertindak satu negara. Pemilu diharapkan dapat dipahami sebagai aksi pembentukan kehendak politis yang merupakan cerminan keragaman pandangan dalam kubu para pencoblos. Selanjutnya, efektivitas sistem pemilu tersebut akan diukur dari apakah sistem pemilu itu mempersembahkan satu sistem politik yang stabil atau tidak. Sebab melalui pemilu yang diharapkan oleh masyarakat adalah terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap stabilitas pemerintah serta peningkatan dalam legitimasi perwakilan politik, sekaligus demokrasi itu sendiri. Selanjutnya legitimasi hasil pemilu akan menjelaskan secara transparan apakah hasil pemilu dan sistem pemilu secara umum dapat diterima, apakah satu sistem pemilu itu menyatukan atau memecah belah masyarakat.¹⁸

Dalam konteks sistem dan aturan main pemilu, partai politik tentu mempunyai andil yang paling besar. Terlebih Indonesia belum secara signifikan dapat menerima calon perseorangan. Semua kandidat sebagian besar berasal dari parpol baik yang memang kader parpol maupun kandidat yang dicalonkan oleh parpol. Sementara itu, bila bicara tentang parpol tentu peran ideologi sangat besar, karena ideologi partai yang menjadi daya tarik sebuah partai terhadap konstituennya dan sebagai pembeda antara kelompok kepentingan diantara konstituennya.

¹⁷ Sigmund Neumann, *Op.cit.* h. 77- 78

¹⁸ *Ibid.* h. 79-82

Pemilu seharusnya mendasarkan diri sebagai implementasi ideologi partai namun kini berubah menjadi pemilu yang mendasarkan diri pada popularitas. Akhirnya, citra seorang pemimpin lebih penting dibanding kompetensi dan kepemimpinannya.¹⁹ Menurut Alan Ware²⁰ dalam bukunya yang berjudul *Political Parties and Party Systems* ideologi partai yang menjadi sarana untuk mengagregasi kepentingan umum itu seharusnya dapat menjadi daya tarik masyarakat dalam memberikan suara di pemilihan umum. Sehingga masyarakat akan memilih partai berdasarkan ideologinya yang seharusnya telah menggambarkan dengan jelas akan menjadi seperti apakah negaranya kelak bila partai yang dipilihnya berkuasa di negaranya.

Sayangnya, perjalanan partai politik di Indonesia selama 32 tahun tanpa ideologi partai dinilai telah menjadi alasan munculnya partai-partai politik tanpa ideologi atau tanpa *political platform* yang jelas pasca orde baru. Partai politik di Indonesia berubah menjadi partai yang mendasarkan pada sifat pragmatis. Dimana sering terjadi inkonsistensi partai politik terhadap janji-janji yang telah diucapkannya saat kampanye, ditambah lagi dengan adanya perilaku politik sebagian politisi yang menyimpang dari seharusnya sebagai pembawa amanat rakyat. Akhirnya, yang terjadi saat ini arti penting ideologi partai politik menjadi kabur.

Saat orde baru masalah ideologi memang telah menjadi sumber utama konflik antar partai politik. Hal tersebut terjadi karena orde baru mengharuskan partai-partai politik menggunakan satu-satunya ideologi yaitu Pancasila.²¹ Namun saat ini, di era reformasi demokrasi, kebebasan untuk memiliki sebuah ideologi dalam partai justru malah menjadi melenceng dari yang sebenarnya diharapkan. Saat ini, partai-partai di Indonesia umumnya menggunakan ideologi hanya sebagai barang yang diperdagangkan setiap lima tahun sekali. Setelah selesainya pemilu, ideologi partai tersebut seolah menjadi tidak bermanfaat ataupun tidak berguna sama sekali.²² Peranan partai politik sebagai elemen sistem politik yang demokratis menjadi tidak terlihat. Padahal seharusnya partai politik berperan dalam mengartikulasikan dan mengagregasi kepentingan yang diajukan berbagai kelompok.

Pada dasarnya pemilu merupakan satu bentuk partisipasi, dimana pencoblos diberi peluang untuk menggarisbawahi keinginan politiknya

¹⁹ Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, Lihat dalam http://en.Wikipedia.org/wiki/Political_Order_in_Changing_Societies, diakses pada tanggal 28 April 2008.

²⁰ Alan Ware, *Political Parties and Party Systems*, USA: Oxford University. 1995, h. 233-245.

²¹ Karim Suryadi, *Antara Roh dan Pragmatisme Partai Politik*, <http://kommpak.com/index.php/12/05/2007/antara-roh-dan-pragmatisme-partai-politik/>, diakses tanggal 1 Maret 2008.

²² "Arbi Sanit: Sistem Multi-Partai Tidak Lagi Efisien", *Antara News*, http://www.antaranews.com/politik/Sistem_Multi-partai_tidak_lagi_efisien.html, diakses tanggal 12 Desember 2012.

dengan boleh memilih partai maupun seorang individu. Menurut J Kristiadi²³, pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (SCIS) Partai politik sebagai mesin politik yang sangat efektif, partai politik harus dapat memahami selera publik terkait penentuan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilu 2014. Jika tidak, partai politik akan ditinggalkan publik. Seperti pada kasus kemenangan Ganjar Pranowo dalam pilkada Jawa Tengah (Jateng) yang lalu telah menunjukkan bahwa masyarakat sesungguhnya rindu pada sosok tokoh alternatif, terlebih bila sosok tersebut dinilai berbeda dengan yang telah dikenal oleh masyarakat.²⁴

Oleh sebab itu, menjelang pemilu 2014 sebenarnya merupakan waktu yang tepat bagi para aktor politik bersama partai politiknya untuk berbenah diri bila ingin mendapat simpati maupun dukungan dari rakyat. Karena yang terjadi saat ini, akibat kondisi perpolitikan dan keadaan partai politik angka golput dari tahun ke tahun justru semakin meningkat. Hal ini terlihat dari angka penajakan partisipasi pemilih dalam berbagai Pemilkada yang digunakan sebagai indikator. Rata-rata golput berada pada angka sekitar 50%. Keberadaan partai dalam Pemilukada telah dinilai bukanlah hal yang menarik, karena masyarakat pada umumnya tertarik pada figur-figur yang tampil, bukan partai yang mencalonkannya.²⁵

B. Peta Politik Peserta Pemilu 2014

Partai Politik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dimana partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris. Pendirian dan pembentukan partai politik tersebut juga harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang

²³ Partai politik Harus Pahami Selera Publik Terkait Capres, <http://www.suarapembaruan.com/home/partai-politik-harus-pahami-selera-publik-terkait-capres/36140>, diakses tanggal 26 September 2013.

²⁴ Dalam konteks persaingan dengan *incumbent* Bibit Waluyo, Ganjar dinilai masyarakat sebagai tokoh yang dizalimi dan mampu menuai simpati publik.

²⁵ Sosialisasi Pemilu Perlu Libatkan Ormas, http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=13441&type=2, diakses tanggal 26 September 2013.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Walau partai politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita partai politik asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berikut Daftar Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2014 adalah:

Nomor Urut	Partai
1.	Partai Nasdem (Nasional Demokrat)
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
5.	Partai Golongan Karya (Golkar)
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
7.	Partai Demokrat (PD)
8.	Partai Amanat nasional (PAN)
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11.	Partai Damai Aceh (PDA)
12.	Partai Nasional Aceh (PNA)
13.	Partai Aceh (PA)
14.	Partai Bulan Bintang (PBB)
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Berkaitan dengan peta politik partai pada pemilu 2014 yang akan datang, menurut Toni Sudibyo, pengamat masalah strategis Indonesia, pada pemilu legislatif April 2014, bisa saja tidak ada Partai politik yang akan mampu menguasai kursi DPR hingga 20% akibat merosotnya image partai politik dimata rakyat. Hal ini akan berbeda dengan hasil perolehan suara di pemilu tahun 2009, dimana perolehan suara Demokrat 20,85% .Golkar 14,45%. PDIP 14,03 %. PKS 7,88%. PAN 6,01%. PPP 5,32%. PKB 4,94%. Gerindra 4,46%. Hanura 3,77 %.²⁶

Terlebih karena dalam Pemilu legislatif (Pileg) nanti persaingan bukan saja antar Calon Legislatif (Caleg) beda partai tapi juga antarcaleg sesama partai, sehingga kompetisi yang akan terjadi berlapis, yaitu persaingan caleg dengan caleg partai lain, sekaligus sesama caleg dalam satu partai dan dapil pun harus saling berkompetisi. Menurut Titi Anggraini Direktur Eksekutif Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) hal ini sangat potensial menimbulkan konflik di dalam partai bila partai tidak memiliki manajemen yang baik. Faktanya pada pemilu 2009 yang lalu, banyak partai mengaku kewalahan mengatur kadernya.²⁷

²⁶ KPU thn 2009

²⁷ <http://www.beritakaget.com/berita/5007/dpp-pdi-p-siap-mengantisipasi-gesekan-antara-caleg-dan-kampanye.html>, diakses pada tanggal 26 September 2013.

Selain itu, perilaku partai politik yang paling mencolok terkait Pemilihan Umum adalah mengenai bagaimana cara partai politik dalam mencari pemimpin pilihan rakyat. Penetapan tentang siapa bakal calon presiden dilakukan dengan berbagai cara oleh Partai-partai politik berdasarkan mekanisme internal masing-masing partai. Misalnya, seperti PDI Perjuangan yang baru akan menentukan calon presidennya setelah hasil Pemilu Legislatif 2014 keluar. Berbeda dengan Partai Demokrat yang memilih melakukan konvensi untuk penentuan siapa bakal capres, untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap partai terlebih di tengah menurunnya elektabilitas partai ini untuk Pemilu 2014. Setelah dilakukannya konvensi ini, berdasarkan hasil survei dari Tim Libang Kompas (Agustus 2013), elektabilitas Partai Demokrat memang naik menjadi 10,11 persen dari sebelumnya 9,3 persen perolehan suara. Posisi tersebut menjadi posisi keempat setelah PDIP 23,6 persen atau naik dari 13,3 persen Golkar 16,0 persen atau naik 15,4 persen, Gerindra 13,6 persen atau naik dari 6,7 persen pada Desember 2012). Sebelumnya, jajak pendapat yang dilakukan CSIS April 2013 menempatkan Golkar 13,2 persen, PDIP 12,7 persen, Gerindra 7,3 persen, PD 7,1 persen, dan PAN 4 persen. Lingkaran Survey Indonesia (LSI) pada Maret 2013 menempatkan Golkar 22,2 persen, PDI-P 18,8 persen, PD 11,7 persen, Gerindra 7,3 persen dan Nasdem 4,5 persen.²⁸

Pada dasarnya Pemilihan Presiden tahun 2014 nampaknya akan ditentukan oleh dua faktor, yaitu pertama, hasil Pemilu Legislatif bulan April 2014 yang akan menghasilkan partai besar mana yang akan mampu menguasai paling tidak 20% jumlah kursi atau lebih, sebagai syarat untuk dapat mencalonkan capresnya. Sedangkan faktor kedua adalah capres yang populer tanpa melihat *track record*-nya namun merupakan calon yang kompeten menurut partai politik.

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahudin mengemukakan, jika revisi UU Pilpres, khususnya terkait besaran *Presidential Threshold* tidak diubah, maka hal itu hanya akan menguntungkan partai politik besar saja. Karena hanya partai politik besar yang nantinya bisa mengusung calon presiden (capres), baik dengan cara maju sendiri ataupun sebagai pemimpin koalisi. Sedangkan bila *Presidential Threshold* diperkecil, maka terbuka peluang bagi partai politik kecil mengusung capres. Mereka memiliki dua pilihan, apakah akan tetap berkoalisi dengan partai politik besar ataupun mengusung calon sendiri.

²⁸ <http://batampos.co.id/2013/09/12/dari-konvensi-menuju-pemenangan-pemilu-2014/>, diakses pada tanggal 26 September 2013.

Namun demikian, penurunan angka *presidential threshold*, belum tentu akan memunculkan alternatif pemimpin yg lebih berkualitas, Direktur Riset dari Charta Politica, Yunarto Wijaya, menilai bisa jadi hal tersebut hanya akan menguntungkan ketua umum atau tokoh-tokoh partai kecil dan menengahkan namun tidak menambah pilihan masyarakat dari sisi kualitas. Oleh sebab itu yang perlu mendapat perhatian partai politik dalam menghadapi pemilu adalah bagaimana agar partai-partai memiliki mekanisme demokratis secara internal yang memungkinkan kader terbaik yang jadi capres. Bukan hanya menjunjung ketum/ketua dewan/majelis syuro yang terjadi seperti sekarang ini.²⁹

Hal lain yang tentunya juga menjadi perhatian rakyat pemilih adalah *track record*-nya sebelumnya. Berkampanye adalah salah satu cara agar mereka bisa mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan umum dengan menjanjikan sesuatu hal. Namun, seringkali janji tersebut akhirnya dinilai hanyalah sekedar janji, tidak sesuai dengan fakta. Hal ini mendorong semakin menjadinya rasa apatis masyarakat.

Hasil survei yang dilakukan oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada bulan Mei 2013 tentang kandidat capres, hasil survei tersebut menyatakan bahwa dari sejumlah nama tokoh capres yang disebutkan oleh 1.635 responden antara lain Jokowi (28,6 persen), Prabowo Subianto (15,6 persen), Aburizal Bakrie (7 persen), Megawati (5,4 persen) dan Jusuf Kalla (3,7 persen), menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko “Jokowi” Widodo di peringkat pertama sebagai tokoh calon presiden (capres) alternatif. Menurut peneliti CSIS, Philip Jurius Vermonte, hasil survei ini bukan soal fenomena Jokowi semata, melainkan bahwa masyarakat Indonesia benar-benar mengharapkan calon pemimpin alternatif, yaitu Jokowi atau calon alternatif lain.³⁰ Dalam situasi saat ini unsur popularitas bakal capres merupakan faktor yang ikut menentukan. Meskipun sebenarnya *track record* kesuksesan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta belum ada. Namun nampaknya masyarakat tidak peduli dan menaruh harapan perubahan terhadap Jokowi. Hal ini nampak jelas terjadi dalam perpolitikan nasional, dimana rakyat kembali lagi menginginkan perubahan dan mereka melihat Jokowi adalah orangnya.³¹

²⁹ Said Salahudin, Partai politik Kecil Sangat Dirugikan Dengan Pembatalan Revisi UU Pilpres, <http://www.suarapembaruan.com/home/partaipolitik-kecil-sangat-dirugikan-dengan-pembatalan-revisi-uu-pilpres/40689>, diakses pada tanggal 26 September 2013.

³⁰ Meski Elektabilitas Lelet, Golkar Konsisten Calonkan Ical, <http://www.suarapembaruan.com/home/meski-elektabilitas-lelet-golkar-konsisten-calonkan-ical/36145>, diakses pada tanggal 26 September 2013.

³¹ Capres Yang Populer, Belum Tentu Kompeten Menjadi Presiden, http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&sid=12955&type=2, diakses pada tanggal 26 September 2013.

Tingginya elektabilitas Jokowi dalam hal isu capres pada pemilu 2014 berangkat dari pemahaman bahwa kepemimpinan seorang pemimpin merupakan kunci maju atau mundurnya suatu bangsa, nasib dan masa depan Bangsa ditentukan sejauh mana kecakapan seorang pemimpin. Keberhasilan Jokowi dalam mengelola Solo dan Jakarta dinilai oleh masyarakat sebagai sebuah janji yang telah terbukti. Jadi, walaupun dalam kampanye para calon legislatif dan Capres serta Cawapres menyampaikan visi dan misinya dalam mengelola dan membangun negeri ini. Namun, visi dan misi yang di sampaikan calon legislatif dan Capres serta cawapres bukan hanya satu-satunya penilaian masyarakat untuk memilihnya.

C. Strategi Partai untuk Pemilu 2014

Dalam strategi pemenangan pemilu, partai perlu mengorganisir kegiatan kampanye. Namun demikian, kampanye yang biasanya dilakukan partai hanya sekedar kampanye pemilu bukan kampanye politik yang hasilnya akan lebih signifikan baik bagi partai maupun bagi konstituen. Ada beberapa perbedaan krusial antara kampanye pemilu dan kampanye politik. Menurut Firmanzah perbandingan kampanye pemilu dan kampanye politik adalah sebagai berikut:³²

	Kampanye Pemilu	Kampanye Politik
<i>Jangka dan batas waktu</i>	Periodik dan tertentu	Jangka panjang dan terus menerus
<i>Tujuan</i>	Mendapat suara	Citra politik
<i>Strategi</i>	Mobilisasi dan berburu pendukung Push-Marketing	Membangun dan membentuk reputasi politik Pull-Marketing
<i>Komunikasi politik</i>	Satu arah, janji dan harapan politik bila memenangkan pemilu	Interaksi untuk pemahaman dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat
<i>Sifat hubungan antara kandidat dan pemilih</i>	Pragmatis/ traksaksi	Hubungan relasional
<i>Produk politik</i>	Janji dan harapan politik Figur kandidat dan program kerja	Pengungkapan masalah dan solusi Ideologi dan sistem nilai yang melandasi tujuan partai

³² Firmanzah. Marketing Politik: Strategi Alternatif Partai Politik, www.mardetymardinsyah.com/wp-content/uploads/2012/03/marketing_politik_firmanzah.pdf, diakses pada tanggal 12 Desember 2012.

<i>Sifat program kerja</i>	Market-oriented dan berubah-ubah dari pemilu satu ke pemilu lainnya	Konsisten dengan sistem nilai partai
<i>Retensi memori kolektif</i>	Cenderung mudah hilang	Tidak mudah hilang dalam ingatan kolektif
<i>Sifat kampanye</i>	Jelas, terukur dan dapat dirasakan langsung aktivitas fisiknya	Bersifat laten, bersikap kritis dan bersifat menarik simpati masyarakat

Berdasarkan tabel di atas, tujuan partai dalam pemenangan pemilu seharusnya didasarkan pada keinginan melakukan perubahan politik secara riil, nyata, dan sehat dalam kehidupan berdemokrasi, menempatkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan agar rakyat bebas dalam menentukan pilihan politiknya, bukan hanya sekedar kampanye untuk menjadi peserta pemilu saja.

Karakteristik sebuah partai akan sangat menentukan *input* dan juga *output* dari sistem politik.³³ Segala program yang ditawarkan kepada rakyat saat pemilu, sikap partai menghadapi isu-isu politik yang ada, pemilihan kandidat untuk jabatan politik baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal harus mengalir dari ideologi tersebut. Implementasi program, kebijakan dan pencalonan pejabat politik dari partai yang mengalir dari ideologi partai akan memberi dampak pada dua hal yaitu *pertama*, partai akan lebih lama bertahan dan *kedua*, rakyat akan mengetahui kepada partai manakah aspirasinya bakal terwadahi.³⁴

Bila dilihat dari sisi fungsinya pada dasarnya partai politik diantaranya memiliki fungsi rekrutmen dan sarana pengatur konflik. Dalam rekrutmen, partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen dilakukan untuk menjamin keberlangsungan hidup partai, serta menjadi salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin negara.³⁵ Sedangkan dalam fungsi sarana pengatur konflik, partai politik menjadi jembatan antara yang memerintah dan yang diperintah. Fungsi ini dilakukan melalui proses merumuskan aneka kepentingan masyarakat yang disebut dengan artikulasi kepentingan dalam

³³ Bdk. Akbar Tanjung, *The Golkar Way Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, Jakarta: Gramedia, 2007, h.11.

³⁴ Soenarko H Setyadarmodjo, *Organisasi Partai Politik dan Demokrasi*, <http://www.journal.unair.ac.id/login/jurnal/filer/MKP-12-1-9.pdf>, diakses 1 Maret 2008.

³⁵ Sigmund Neumann, *Op.cit.* h.19.

kerangka komunikasi dari bawah ke atas. Dengan artikulasi kepentingan itu, aneka tuntutan dan kepentingan masyarakat dirumuskan partai untuk disampaikan kepada pemerintah. Sikap-sikap dan tuntutan yang sama atau menyangkut hal yang sama, digabung menjadi satu dan hal ini dinamakan dengan penggabungan kepentingan atau agregasi kepentingan. Artikulasi dan agregasi kepentingan ini, dalam sistem politik, menjadi *input* (masukan) bagi instansi-instansi yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat seperti Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah dan sebagainya. Bagi instansi-instansi tersebut artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan diolah atau dikonversi menjadi *output* (keluaran) dalam bentuk undang-undang, kebijakan umum dan bentuk-bentuk lain yang mengikat.³⁶

Oleh sebab itu, bagi partai nasionalis pada umumnya, perlu dilakukan perubahan nyata dalam tubuh partai sebagai partai politik yang demokratis dan modern. Dimana seluruh kader, konstituen dan partisipan dapat diharapkan secara bersama-sama keikutsertaannya untuk menjaga kualitas demokrasi agar berlangsung secara sehat serta jujur sehingga kepercayaan rakyat terhadap partai akan meningkat bahkan dapat memperoleh suara yang signifikan dalam pemilu.

Hal ini bisa jadi berbeda bila dibandingkan dengan partai politik Islam. Pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya memberi contoh dengan PPP.³⁷ Menurutnya PPP akan sulit dalam mendongkrak suara pada pemilu 2014 karena tiga hambatan. Hambatan tersebut adalah, yang pertama adanya kecenderungan pangsa pasar Islam menyusut yang kini hanya menyisakan 22% - 27% untuk diperebutkan oleh berbagai partai politik Islam. Kecenderungan dari tingkat rasionalitas yang semakin tinggi membuat pangsa Islam semakin merosot dan mendorong perkembangan partai politik tengah atau '*catch all party*' (partai yang menyasar semua). Seperti halnya PKS, partai berbasis Islam namun lebih menempatkan diri menjadi partai tengah. Kedua, adanya budaya ketergantungan partai politik kepada pemimpin, sangat tinggi, dalam hal ini partai politik memerlukan pemimpin yang kuat dan dikenal luas masyarakat. Ketiga, sebagai partai berbasis ideologi Islam, PPP tidak memiliki sistem kaderisasi dan rekrutmen yang kuat dan mampu menanamkan ideologi.

Oleh sebab itu, menurutnya dalam strategi perolehan suara dalam pemilu 2014, PPP harus mulai melakukan pembenahan. Pertama, PPP harus memuat sasaran pangsa Islam yang lebih jelas. Kedua, PPP juga dapat melakukan diversifikasi untuk memunculkan pemimpin dengan menguatkan citra

³⁶ *Ibid.*, h.18.

³⁷ http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=188553:inilah-3-hambatan-untuk-ppp&catid=17:politik&Itemid=30, diakses pada tanggal 26 September 2013.

tokoh-tokoh muda yang telah dikenal masyarakat. Walau ada tokoh-tokoh yang dikenal namun sayang belum dieksplorasi secara lebih positif untuk meningkatkan citra dan kedekatan dengan masyarakat. Ketiga, menciptakan sistem rekrutmen dan kaderisasi yang kuat.³⁸

Selain terkait dengan pangsa pasar pemilih secara umum, jenis pemilih yang harus juga menjadi perhatian partai adalah kelompok yang memilih untuk tidak memilih atau golput. Ketua LBH Penegak Demokrasi Pemilu, Didik Supriyanto menilai bahwa persoalan Golput selalu identik dengan kalangan pemuda. Selain itu, ada kelompok lain yang juga kerap memilih Golput, yakni kelompok pemalas.³⁹ Terkait dengan pemilih muda, menurut Dosen Filsafat Islam di UIN Ar Raniry, keberadaan suara pemilih pemula pada Pileg 2014 akan menjadi sangat strategis. Dimana angka suara pemilih pemula pada pileg 2014 nanti secara kuantitatif sangat signifikan. Dari total jumlah pemilih yang diperkirakan mencapai 175 juta orang pada 2014 mendatang, kontribusi suara pemilih pemula mencapai 30 juta orang, atau hampir 17 persen dari jumlah pemilih.⁴⁰

Partai politik harus dapat memahami sikap politik pemilih pemula guna meraih simpati dari kaum muda. Perlu disadari pentingnya melibatkan pemuda dalam pelaksanaan pemilu serta perlunya memberi pemahaman dan sosialisasi mengenai manfaat dan tujuan pemilu kepada seluruh masyarakat agar tetap menggunakan hak suaranya. Upaya penting yang harus didorong adalah edukasi politik. Terutama bagi kaum muda, persinggungan politik hari ini akan memberikan dua dampak serius bagi pemilih pemula. sikap politik dari para pemilih muda pun akan membawa dampak yang berarti, baik dampak terhadap mengusung sebuah partai menjadi simpatisannya, atau justru semakin apatis akibat kemerosotan situasi politik belakangan ini.⁴¹

Bagi masyarakat awam, dalam mengelola dan mencapai cita-cita nasional tentunya tidak mudah dicapai apabila pemimpinnya tidak memiliki jiwa melayani masyarakat, dan mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi maupun golongannya. Untuk itu yang dibutuhkan masyarakat adalah pemimpin yang memiliki kemampuan dalam membuat rencana, memecahkan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ <http://news.okezone.com/read/2013/08/27/339/856463/pemilih-golput-tanggung-jawab-caleg-partai-politik-kpu>, diakses pada tanggal 26 September 2013.

⁴⁰ http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=307640:suara-pemilih-pemula-strategis-di-pemilu-2014&catid=13:aceh&Itemid=26, diakses pada tanggal 26 September 2013.

⁴¹ http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=307640:suara-pemilih-pemula-strategis-di-pemilu-2014&catid=13:aceh&Itemid=26, diakses pada tanggal 26 September 2013.

masalah, mengerti dan memahami ide-ide yang bersifat kompleks serta mampu mentransformasikan pengalaman menjadi pengetahuan. Karena seorang pemimpin harus mampu mendesain masa depan bangsa dan negara menjadi lebih baik dari sekarang, dan seorang leader dituntut untuk berani dan mampu menghadapi perubahan.⁴²

Perlu disadari bahwa pemilu akan menghasilkan produk politik yang berbeda dengan produk komersial. Menurut Firmanzah⁴³ dalam Pemilu, semua pemilih akan memberikan suara dalam sehari secara bersamaan. Sekalipun pemilih belum atau tidak dapat menganalisa kandidat atau partai politik secara lengkap. Jadi, meskipun dimungkinkan adanya kekecewaan dalam jangka panjang setelah memberikan suaranya, pada kenyataannya tidak ada harga nominal yang dibayar dalam memilih sebuah partai atau calon presiden. Akhirnya masyarakat nantinya memutuskan untuk pindah dukungan ke partai lain, dimana dalam hal ini pemilih tetap harus menerima hasil pilihan kolektif meskipun itu berbeda dengan pilihannya. Hal ini berbeda dengan perilaku konsumen dalam produk komersial.

Oleh sebab itu, marketing politik tidak dapat hanya dilihat selama periode kampanye saja. Partai politik harus terus menerus memperhatikan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dimana Partai dan para caleg dan capresnya terus melakukan kampanye politik yang bersifat jangka panjang dan dilakukan secara terus menerus, bukan hanya sekedar kampanye pemilu yang bersifat jangka pendek dan biasanya dilakukan menjelang Pemilu. Tujuan Marketing Politik secara umum adalah untuk menjadikan pemilih sebagai subyek dan bukan sebagai obyek politik, menjadikan permasalahan yang dihadapi pemilih adalah langkah awal dalam menyusun program kerja yang ditawarkan dalam kerangka masing-masing ideologi partai. Marketing politik tidak menjamin sebuah kemenangan, tapi menyediakan “perangkat” bagaimana menjaga hubungan dengan pemilih untuk membangun kepercayaan dan selanjutnya memperoleh dukungan suara.

Melihat kenyataan yang demikian, diperlukan kesadaran partai dalam membangun kesadaran politik yang kolektif di masyarakat. Di tengah apatisme masyarakat terhadap partai, partai dan para aktor politik memang perlu bekerja lebih keras dari sebelumnya. Terutama dalam memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa politik digunakan untuk memberikan kebaikan bagi masyarakat. Dalam hal ini para politisi harus berperan aktif

⁴² Pemimpin Berkarakter Untuk Pemilu 2014, http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=13027&type=2, diakses pada tanggal 26 September 2013.

⁴³ *Op.Cit.*, Firmanzah

dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa masih ada politikus yang bertanggungjawab kepada konstituennya.

Dalam pelaksanaan pemilu, ada beberapa hal yang harus disadari betul oleh masing-masing caleg maupun capres. Baik caleg maupun capres perlu memahami, menguasai serta menjiwai platform politik yang di perjuangkan oleh Partainya dengan sebaik-baiknya dan menjadikan platform tersebut sebagai wajah politik untuk setiap sosialisasi pemenangannya. Khusus bagi caleg, seorang caleg perlu sungguh-sungguh dalam membentuk jaringan di dapilnya. Calon legislatif juga harus melakukan kunjungan dan tatap muka dengan warga yang ada di dapilnya, sesuai dengan rencana yang di susun berdasarkan peta situasi dan kondisi yang telah diketahui dan di kenali oleh caleg tersebut. Peta situasi dan kondisi dapil yang harus dipahami oleh seorang caleg bukan hanya mengenai wilayah teritorial saja namun hingga situasi dan kondisi sosial, politik, budaya dan ekonomi penduduk di lingkungan Dapilnya tersebut. Seiring dengan membangun jaringan mitra, caleg juga harus terus melakukan kordinasi dengan struktur Partai baik dalam DPD, DPC dan Korcam di dapilnya.

Dalam pendekatannya terhadap masyarakat seorang caleg harus dapat berperan aktif sebagai mitra untuk membahas bahkan mencari solusi dari permasalahan yang masyarakat alami. Dengan memelihara dan meningkatkan frekuensi kunjungannya kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan maka perluasan jaringan dengan menghasilkan lebih banyak lagi mitra yang akan menjadi simpatisan juga akan bertambah.

Hal terpenting yang seharusnya disadari oleh setiap caleg adalah bahwa seorang caleg harus dapat jujur baik kepada dirinya sendiri dan kepada masyarakat. Jangan pernah berpikir maupun berniat untuk membeli hak pilih mereka. Lebih baik masyarakat dibimbing dan dihimbau untuk menggunakan hak dan kewajiban politiknya dengan sadar dan sukarela. Berikutnya para caleg akan dihadapkan pada upaya untuk merubah kehidupan warga agar dapat berubah bahkan meningkat untuk lebih baik dan lebih maju. Bila hal yang demikian sungguh-sungguh dilakukan oleh setiap caleg maka caleg dan partai politik telah melakukan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian bagi partai dan caleg maupun capres ialah secara internal, partai perlu mengontrol belanja kampanye yang dikeluarkan caleg maupun partai. Bahkan partai perlu menyusun pedoman etika berikut penegakannya berupa sanksi, jika kompetisi internal para caleg tidak sehat dan merusak berkaitan dengan masalah belanja kampanye ini. Partai harus berperan aktif agar pembatasan dana kampanye caleg seperti

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 dapat berjalan secara kompetitif.

Bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tak mudah mensiasati persaingan sehat antar calon legislatif dari internal partai untuk daerah pemilihan sama dalam pemilu legislatif 2014. Terlebih persaingan juga terjadi dengan caleg partai lain. Terutama terkait faktor potensial yang dapat menciptakan gesekan antar calon legislatif internal yaitu modal belanja kampanye caleg yang tanpa batasan. Sehingga, caleg yang memiliki banyak uang dapat mengeluarkan dana secara besar-besaran dalam kampanye dan tidak peduli dengan caleg satu partai untuk dapil yang sama. Oleh sebab itu, sebagai partai PDIP berusaha untuk mengorganisir kegiatan kampanye secara kolektif.⁴⁴

Dalam hal ini cara berpikir kader partai pun harus berubah. Di sinilah dibutuhkan perubahan cara pandang kader dalam melihat posisi partai saat ini. Sebagai sebuah partai yang mengalami berbagai tekanan politik, kader harus dapat secara terus menerus menyapa dan merespon berbagai persoalan atas apa yang menjadi aspirasi dan kepentingan rakyat yang harus diperjuangkan untuk kepentingan rakyat. Kader dan konstituen partai pun kedepannya perlu selalu sadar bahwa keberadaan dan kinerja partai bukan lah hanya musiman. Partai harus secara tak terbatas baik dalam sisi waktu maupun kinerja terus berupaya dalam menjaga dan mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.⁴⁵ Oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari para caleg bahwa dalam partai politik, setiap calegnya memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk berproses sesuai dengan rencana strategis, program dan kegiatan partai untuk dapat mencapai hasil berupa perolehan suara yang cukup untuk memperoleh kursi parlemen di pusat ataupun daerah.

Oleh sebab itu, terkait persiapan pemilu 2014, kritik dan saran yang disampaikan oleh berbagai kalangan terhadap partai, merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dihargai oleh partai. Partai harus dapat terbuka terhadap pendapat, kiritik maupun saran dari siapa pun, untuk memperbaiki dan memperkecil kesalahan atau kekurangannya. Secara institusional, partai juga harus terus berupaya memperbaiki sistem rekrutmen partai dengan manajemen modern bukan dengan cara-cara yang nepotisme dan kolutif, utamanya ketika menempatkan kader utamanya pada pos-pos penting dan strategis mulai dari pusat hingga daerah. Selain itu, kader-kader partai

⁴⁴ <http://www.beritakaget.com/berita/5007/dpp-pdi-p-siap-mengantisipasi-gesekan-antara-caleg-dan-kampanye.html>, diakses pada tanggal 26 September 2013.

⁴⁵ *Ibid.*

pun harus memiliki kesadaran yang kuat untuk terus menerus menjaga kekompakan dan soliditas dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Kekompakan dan soliditas hubungan personal kader partai akan memperkuat kelembagaan partai yang dapat memulihkan kepercayaan dan kecintaan rakyat kepada partai. Karena salah satu wujud dalam menjalankan demokrasi adalah dengan menjalankan konstitusi secara baik dan benar menggunakan manajemen transparansi yang terukur.

Secara umum pemilu yang damai tidak akan dapat dicapai apabila rakyat Indonesia tidak secara bersama-sama menjaganya. Untuk itulah rakyat harus bijaksana dalam menerima kampanye dari calon-calon anggota legislatif maupun calon Presiden. Masyarakat juga diharap tidak mudah terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan pribadi calon legislatif dan calon Presiden. Rakyat Indonesia harus bijaksana dalam menanggapi perbedaan pendapat. Demokrasi merupakan sistem yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan ini yaitu menempatkan wakil-wakil masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintah yang dipimpin oleh Presiden yang telah dipilih melalui pemilu.⁴⁶

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Efektivitas sistem pemilu akan diukur dari apakah sistem pemilu itu mempersembahkan satu sistem politik yang stabil atau tidak. Sebab melalui pemilu yang diharapkan oleh masyarakat adalah terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap stabilitas pemerintah serta peningkatan dalam legitimasi perwakilan politik, sekaligus demokrasi itu sendiri. Perjalanan partai politik selama 32 tahun tanpa ideologi partai dinilai telah menjadi alasan munculnya partai politik yang mendasarkan pada sifat pragmatis. Dimana sering terjadi inkonsistensi partai politik terhadap janji-janji yang telah diucapkannya dan perilaku politik sebagai politisi yang menyimpang dan tidak membawa amanat rakyat. Bahkan peranan partai politik sebagai elemen sistem politik yang demokratis tidak lagi tampak. Padahal partai politik seharusnya dapat menawarkan alternatif kebijakan terhadap permasalahan bangsa, mengelola potensi konflik, serta menjaga agar saluran komunikasi tetap terbuka sehingga masyarakat dapat terhubung dengan proses politik secara sehat.

Pada dasarnya Pemilihan Presiden tahun 2014 nampaknya akan ditentukan oleh dua faktor, yaitu pertama, hasil Pemilu Legislatif bulan April 2014 yang akan menghasilkan partai besar mana yang akan mampu menguasai paling tidak 20% jumlah kursi atau lebih, sebagai syarat untuk dapat mencalonkan capresnya.

⁴⁶ Pemilu 2014 Yang Damai Untuk Kesejahteraan Rakyat, http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=13026&type=2, diakses tanggal 26 September 2013.

Sedangkan faktor kedua adalah capres yang populer tanpa melihat *track record*-nya namun merupakan calon yang kompeten menurut partai politik.

Oleh sebab itu, marketing politik tidak dapat hanya dilihat selama periode kampanye saja. Partai politik harus terus menerus memperhatikan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dimana Partai dan para caleg dan capresnya terus melakukan kampanye politik yang bersifat jangka panjang dan dilakukan secara terus menerus, karena tujuan dari marketing politik secara umum adalah untuk menjadikan pemilih sebagai subyek dan bukan sebagai obyek politik.

Kader dan konstituen partai pun kedepannya perlu selalu sadar bahwa keberadaan dan kinerja partai bukan lah hanya musiman. Partai harus secara tak terbatas baik dalam sisi waktu maupun kinerja terus berupaya dalam menjaga dan mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Perlu adanya kesadaran dari para caleg bahwa dalam partai politik, setiap calegnya memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk berproses sesuai dengan rencana strategis, program dan kegiatan partai untuk dapat mencapai hasil berupa perolehan suara yang cukup untuk memperoleh kursi parlemen di pusat ataupun daerah. Dan dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang harus disadari betul oleh masing-masing caleg. Calon legislatif perlu memahami, menguasai serta menjiwai platform politik yang di perjuangkan oleh partainya dengan sebaik-baiknya.

Dalam strategi pemenangan pemilunya, partai perlu mengorganisir kegiatan kampanye secara kolektif. Secara internal, partai juga harus mengontrol belanja kampanye yang dikeluarkan caleg maupun partai. Partai juga harus menyusun pedoman etika berikut penegakannya berupa sanksi, jika kompetisi internal para caleg tidak sehat dan merusak. Partai sebagai bagian dari pergerakan demokrasi harus dapat memberikan andil yang sangat besar bagi kemajuan bangsa dengan senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat. Dimana pembelaan kepada rakyat dilakukan bukan hanya dengan jargon yang terdengar seperti membela kepentingan dan hak rakyat, namun perlu adanya kiprah pembuktian partai terhadap keberpihakannya terhadap rakyat. Pembuktian ini sangat dibutuhkan, walau pada kenyataannya seringkali jauh dari harapan rakyat itu sendiri.

Oleh karenanya di tengah apatisme masyarakat terhadap partai, para politisi dan partai harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa masih ada politikus yang bertanggungjawab kepada konstituennya. Pemilu yang damai tidak akan dapat dicapai apabila rakyat Indonesia tidak secara bersama-sama menjaganya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amal, Ichlasul, *Teori-teori Mutahir Partai Politik*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2007.
- Easton, David, *A Framework for Political Analysis*, Toronto: The Prentice Hall of Canada, 1965.
- Eulau, Heinz, *Micro-Macro Political Analysis: Accents on Inquiry*, Chicago Illinois: Aldine Publishing Comp, 1969.
- Firmanzah. *Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007
- Kartawidjaja, Pipit R. dan Mulyana W. Kusumah, (ed: A. Josias Simon R. dan Aldrin Situmeang). *Sistem Pemilu dan Pemilihan Presiden: Suatu Studi Banding* (Jakarta, Penerbit: KIPP Eropa, Friedrich-Naumann- Stiftung (FNS), dan Indonesian Society for Democracy and People Employment (INSIDE), Mei 2002).
- Perdana, Inco Hary, *Tesis Political Marketing Partai Politik Baru Menuju Pemilu 2014*
- Studi Kasus: *Strategi Pemenangan Partai Nasdem, FISIP UI Pasca Sarjana Manajemen Komunikasi Politik*. 2012.
- Ranney, Austin, *The Governing of Man*, New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1996.
- Sanit, Arbi. *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Tanjung, Akbar. *The Golkar Way Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, Jakarta: Gramedia, 2007.
- Ware, Alan. *Political Parties and Party Systems*, USA :Oxford University. 1995.

Website

- Akira, Riky, *Ideologi Partai Politik di Indonesia*, http://www.prp-indonesia.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=95, diakses 7 Maret 2008.

- Arbi Sanit: Sistem Multi-Partai Tidak Lagi Efisien”, *Antara News*, http://www.antaranews.com/politik/Sistem_Multi-partai_tidak_lagi_efisien.html, diakses 12 Desember 2012
- Capres Yang Populer, Belum Tentu Kompeten Menjadi Presiden, http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=12955&type=2, diakses 26 September 2013.
- Soenarko H Setyadarmodjo, *Organisasi Partai Politik dan Demokrasi*, <http://www.journal.unair.ac.id/login/jurnal/filer/MKP-12-1-9.pdf>, diakses 1 Maret 2008.
- <http://news.okezone.com/read/2012/12/30/339/739170/redirect>, diakses 26 September 2013.
- <http://news.okezone.com/read/2013/08/27/339/856463/pemilih-golput-tanggungjawab-caleg-partai-politik-kpu>, diakses 26 September 2013.
- Huntington, Samuel P. *Political Order in Changing Societies*, Lihat dalam http://en.Wikipedia.org/wiki/Political_Order_in_Changing_Societies, diakses pada tanggal 28 April 2008.
- Krisis Kepercayaan Menuju 2014, <http://www.dakwatuna.com/2013/03/27/30012/krisis-kepercayaan-menuju-2014/#axzz2g4SH8GkL>, diakses 26 September 2013.
- Kumoro, Bawono, Peneliti Politik The Habibie Center, (Kontan, Sabtu, 11 Februari 2012) MEDIA DAN KONTESTAN PILPRES 2014, <http://www.bawonokumoro.com/?p=228>, diakses 26 September 2013.
- Meski Elektabilitas Lelet, Golkar Konsisten Calonkan Ical, <http://www.suarapembaruan.com/home/meski-elektabilitas-lelet-golkar-konsisten-calonkan-ical/36145>, diakses 26 September 2013.
- Partai politik Harus Pahami Selera Publik Terkait Capres, <http://www.suarapembaruan.com/home/partaipolitik-harus-pahami-selera-publik-terkait-capres/36140>, diakses tanggal 26 September 2013.
- Pemilu 2014 Yang Damai Untuk Kesejahteraan Rakyat, http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=13026&type=2, diakses tanggal 26 September 2013.
- Pemimpin Berkarakter Untuk Pemilu 2014, http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=13027&type=2, diakses 26 September 2013.

Said Salahudin, Partai politik Kecil Sangat Dirugikan Dengan Pembatalan Revisi UU Pilpres, <http://www.suarapembaruan.com/home/partaipolitik-kecil-sangat-dirugikan-dengan-pembatalan-revisi-uu-pilpres/40689>, 26 September 2013.

Sosialisasi Pemilu Perlu Libatkan Ormas, http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=13441&type=2, diakses 26 September 2013.

Suryadi, Karim. *Antara Roh dan Pragmatisme Partai Politik*, <http://kommpak.com/index.php/12/05/2007/antara-roh-dan-pragmatisme-partai-politik/>, diakses 1 Maret 2008.